

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
BERSAMA 5 (LIMA) MENTERI TENTANG PENATAAN
DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL**
(Studi pada Tingkat Satuan Pendidikan SMA Negeri di Kabupaten Gayo Lues)

TESIS

OLEH

**RATNA SARI WIDALY
NPM. 121801091**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bersama 5 (Lima) Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Tingkat Satuan Pendidikan SMA Negeri di Kabupaten Gayo Lues)

Nama : Ratna Sari Widaly

NPM : 121801091

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Warjio, MA

Pembimbing II



Drs. Done Ali Usman, M.AP

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Warjio, MA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 29 April 2014

Nama : Ratna Sari Widaly

NPM : 121801091



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Drs. Kariono, MA
Sekretaris : Isnaini, SH, M.Hum
Pembimbing I : Dr. Warjio, MA
Pembimbing II : Drs. Done Ali Usman, M.AP
Penguji Tamu : Drs. Ridwan Rangkuti, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, April 2014

Yang menyatakan,



Ratna Sari Widaly

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah “ Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bersama 5 (lima) Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Tingkat Satuan Pendidikan SMA Negeri di Kabupaten Gayo Lues)”. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan penulis. Dalam penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. A. H. M. Ya`kub Matondang MA, Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi MAP, Program Pascasarjana Universitas Medan Area dan sebagai Pembimbing I yang telah memberikan banyak waktu, pencerahan berupa bimbingan, kritik dan saran dalam proses penulisan tesis hingga selesai.

5. Bapak Drs. H. Wahab Makmur sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gayo Lues yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di jajaran Dinas Pendidikan dan SMA-SMA Negeri di Kabupaten Gayo Lues.
6. Bapak Wardana, S.Pd sebagai Sekeretaris Dinas Pendidikan dan Bapak Usman, S.Ag sebagai Staff Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues yang membantu memberikan informasi dan data-data yang penulis butuhkan.
7. Bapak Drs. Samsul Bahri sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Gayo Lues.
8. Bapak Idris, SE sebagai Kepala Bidang Ekonomi dan Perencanaan Bappeda Kabupaten Gayo Lues.
9. Seluruh Kepala Sekolah dan Guru SMA Negeri di Kabupaten Gayo Lues yang telah berpartisipasi memberikan informasi untuk proses penulisan tesis ini.
10. Bapak dan Ibu dosen serta Staff Administrasi PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
11. Keluarga terkasih yang memberikan semangat dan dukungan moril serta materil dari awal perkuliahan hingga selesai penyusunan tesis ini.
12. Sahabat dan semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga tesis ini bisa bermanfaat baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues terutama dalam implementasi

kebijakan khususnya dibidang penataan dan pemerataan guru dan kebijakan dalam bidang pendidikan.

Medan, Maret 2014

P e n u l i s

Ratna Sari Widaly

ABSTRAK

Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bersama 5 (lima) Menteri Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Tingkat Satuan Pendidikan SMA Negeri di Kabupaten Gayo Lues)

Nama : Ratna Sari Widaly
NPM : 121801091
Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Warjio, MA
Pembimbing II : Drs. Done Ali Usman, M.AP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan dan pemerataan Guru PNS pada jenjang SMA Negeri di Kabupaten Gayo Lues dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut. Kabupaten Gayo Lues salah satu kabupaten termuda pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara yang baru terbentuk tahun 2002. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian dengan menggunakan informan yang dipilih secara acak terdiri dari Staf Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas dan dilaksanakan di SMA-SMA Negeri di Kabupaten Gayo Lues. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme pelaksanaan kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS pada jenjang SMA Negeri di Kabupaten Gayo Lues dimulai dengan koordinasi, pengumpulan database guru, verifikasi data, penghitungan skor guru, penataan guru, dan mutasi guru; 2) Implementasi kebijakan penataan dan pemerataan Guru PNS di Kabupaten Gayo Lues dilihat dari aspek komunikasi melalui sosialisasi sudah konsisten, akan tetapi pada aspek sumber daya baik sumber daya manusia (Guru PNS), fasilitas, anggaran dan kewenangan masih ada keterbatasan, pelaksana memiliki disposisi yang masih kurang tegas hal tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan sosial/budaya (sistem kekerabatan yang erat sehingga mengutamakan kepentingan pribadi/keluarga) serta keadaan politik dan ekonomi masyarakat setempat; 3) Dampak positif bagi guru adalah terpenuhinya beban mengajar guru dan kemudahan mencari jam mengajar sedangkan dampak negatifnya adalah guru sulit beradaptasi di sekolah baru, timbulnya konflik batin karena menggeser guru, jadwal kegiatan antar sekolah bertabrakan serta bertambahnya jarak dan waktu perjalanan. Selanjutnya dampak positif bagi sekolah adalah terpenuhinya kebutuhan guru.

Kata Kunci : Implementasi, Penataan dan Pemerataan Guru, SMA Negeri

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Hasil Penelitian	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Implementasi Kebijakan.....	13
2.2 Surat Keputusan Bersama	24
2.3 Definisi Guru.....	25
2.4 Definisi Pegawai Negeri Sipil.....	27
2.5 Penataan dan Pemerataan	29
2.6 Definisi Satuan Pendidikan	31
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.2 Bentuk Penelitian	33
3.3 Informan Penelitian	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5 Teknik Analisis Data	38
BAB IV : GAMBARAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES	
4.1 Profil Kabupaten Gayo Lues	39
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Gayo Lues.....	39
4.1.2 Lokasi dan Letak Geografis Kabupaten Gayo Lues	40
4.1.3 Demografi dan Tofografi	42
4.1.4 Visi dan Misi.....	44
4.1.4.1 Visi Kabupaten Gayo Lues	44
4.1.4.2 Misi Kabupaten Gayo Lues.....	45
4.2 Pendidikan.....	46

4.2.1 Angka Melek Huruf	46
4.2.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah	47
4.2.3 Angka Partisipasi Sekolah	47
4.2.4 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan.....	50
4.2.5 Rasio Ketersedian Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah	51
4.2.6 Rasio Guru Per Murid	52
4.2.7 Sarana dan Prasarana Pendidikan	54
4.2.8 Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues	56
4.2.9 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gayo Lues.....	58
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Hasil Penelitian	61
5.1.1 Karakteristik Responden	61
5.1.2 Data Ketersedian Guru Pada Tingkat Satuan Pendidikan SMA Negeri	63
5.2 Mekanisme Implementasi Penataan dan Pemerataan Guru PNS di Kabupaten Gayo Lues	66
5.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Penataan dan Pemerataan guru PNS	77
BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	81
6.2 Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 4.1. Nama dan Luas Kecamatan Serta Persentase di Kabupaten Gayo Lues	41
Tabel 4.2. Komposisi Penduduk menurut kelompok Usia di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010	44
Tabel 4.3. Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Gayo Lues	46
Tabel 4.4. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Gayo Lues.	47
Tabel 4.5. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Gayo Lues	48
Tabel 4.6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010 Kabupaten Gayo Lues.	49
Tabel 4.7. Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Gayo Lues	51
Tabel 4.8. Jumlah Guru dan Muurid SD, SMP dan SMA Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Gayo Lues	53
Tabel 4.9. Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	54
Tabel 4.10 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang pendidikan Tahun Tahun 2010.....	55
Tabel 4.11. Perkembangan angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2007/2008 – 2010/2011	56
Tabel 5.1 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin.....	61
Tabel 5.2. Distribusi Responden Menurut Umur	62
Tabel 5.3. Distribusi Responden Menurut Pendidikan	62
Tabel 5.4. Jumlah Guru PNS Per Sekolah SMA Negeri di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013.....	63

Tabel 5.5. Pendapat Responden Tentang Penerapan SKB 5 (lima) Menteri Tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS Pada Tingkat Satuan Pendidikan SMA Negeri Kabupaten Gayo Lues.....	68
Tabel 5.6. Pendapat Responden Tentang Manfaat SKB 5 (lima) Menteri Tentang Penataan dan Pemerataan guru PNS Pada Tingkat satuan Pendidikan SMA Negeri di Kabupaten Gayo Lues dalam Peningkatan Mutu Pendidikan.....	69
Tabel 5.7. Pendapat Responden Tentang Manfaat SKB 5 (lima) Menteri Tentang Penataan dan Pemerataan guru PNS Pada Tingkat satuan Pendidikan SMA Negeri di Kabupaten Gayo Lues dalam Peningkatan Mutu Guru	69
Tabel 5.8. Pendapat Responden Tentang SKB 5 (lima) Menteri Tentang Penataan dan Pemerataan guru PNS	70
Tabel 5.9 Pendapat Responden Tentang Penerapan SKB 5 (lima) Menteri Tentang Penataan dan Pemerataan guru PNS Pada Tingkat satuan Pendidikan SMA Negeri di Kabupaten Gayo Lues.....	71

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1. Model Proses Implementasi	17
Gambar 2.2 Dampak langsung dan Tidak Langsung dari Implementasi Menurut George C. Edwards III (1980 : 148)	23
Gambar 4.1. Persentase penduduk Usia 10 Tahun keatas Menurut Penurut Pendidikan Tetinggi Yang di Tamatkan Tahun 2010.....	51
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gayo Lues	60
Gambar 5.1. Data Kebutuhan, Ketersediaan, Kelebihan dan Kekurangan Guru PNS SMA menurut Mata pelajaran di Kabupaten Gayo Lues	65
Gambar 5.2. Mekanisme Implementasi SKB 5 (lima) Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru di Kabupaten Gayo Lues.....	72

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggungjawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. UUD 1945 Pasal 31, ayat 3 juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada Pasal 31, ayat 5 menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia". Selanjutnya pada Pasal 31, ayat 1 dari UUD 1945 dengan tegas mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Oleh sebab itu menjadi kewajiban pemerintah untuk mengupayakan agar setiap warga negara dapat memperoleh pengajaran/pendidikan yang menjadi haknya itu, demi terwujudnya suatu kehidupan bangsa yang cerdas, yang menjadi cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Bila dibandingkan dengan undang-undang

pendidikan sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, ada kemiripan kecuali berbeda dalam pengungkapan pada pasal 4 ditulis;

"Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi-pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung-jawab kemasyarakatan dan kebangsaan."

Selanjutnya pada Pasal 15, UU No. 2 Tahun 1989, tertulis;

"Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi."

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut pemerintah juga mengusahakan beberapa perbaikan seperti yang termaktub dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti tersebut diatas tentunya banyak hal-hal yang menjadi permasalahan yang dihadapi khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan. Adapun masalah-masalah yang dihadapi antara lain:

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1990, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Malang : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya..
- Abdul Wahab, Solichin, 2006, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Ahmad Salih dan Yvonne Doll . 2013. *A Middle Management on Strategy Implementation*, *International Journal of Business and Management* Vol. 8 No. 22 October 2013. Pg 35.
- Anupama Bhargava. 2011. *Perception of Student Teacher About Teaching Competencies*, *American International Journal of Contemporary Research* Vol. 1 No. 1 July 2011.
- Darmiyati Zuchdi dan Budiasih, 1997. *Pendidikan Bahasa Kelas Rendah*. Jakarta: Dirjen Dikti dan Depdikbud.
- Donald S.Van Meter dan Carl E.Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process; A Conceptual Framework*, Administration and Society, Vol 6.
- Draft RTRW Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Revisi Cet. 9, Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya
- Earl V. Pullias and James D. Young, 1968, *A Teacher is Many Things*, Indana : Indiana University Press
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*, Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Gayo Lues dalam Angka Tahun 2014
- Hoogerwerf A, 1983. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Erlangga
- Jamaluddin, Noor Popoy, 1978. *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PGAN,DEPAG.
- Komba. L.W. dan Nkumbi.E. 2008. *Teacher Professional Development in Tanzania: Perceptions and Practices*, *Journal of International Cooperation in Education* Vol. 11 No. 3, pg. 67-83 2008.

- Langgulong Hasan, 1988. *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Law, Jennifer, 2011. *Strategy Implementation and Public Service Performance*, *Journal of Public Administration Research and Theory* Vol. 43 No 6, pg. 643-671 Sept 2011.
- Muchsan, S.H, 2000. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Moleong J, Lexy. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nazir Mohd, 2005. *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Noeng Muhadjir, 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yokyakarta : Rake Sarasin Cet 5
- Poerwadarminta. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 – 2017.
- Robbie Water Robichau and Laurence E. Lynn Jr, *The Implementation of Public Policy Still The Missing Link*, *The Policy Study Journal* Vol. 37 No. 1 November 2009.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1986. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3E.
- Stake, R. E. 1995. *The Art of Case Study Research*, Thousand Oaks, CA: Sage
- Suparlan, 2006. *Guru Sebagai Profesi*, Yogyakarta : Hikayat Publishing
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Malang : Bayumedia Publishing
- Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Pressindo

RUJUKAN ELEKTRONIK

Kabupaten Gayo Lues – AcehPedia, dari
http://acehpedia.org/Kabupaten_Gayo_Lues

Kabupaten Gayo Lues - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, dari
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gayo_Lues#Pemerintahan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari <http://kbbi.web.id>

KOMPAS.com Jumat 24 Mei 2013. ***Sekitar 1.752 siswa dinyatakan tidak lulus dan dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Kabupaten Gayo Lues berada pada peringkat terendah yaitu sebesar 23,68%..*** Dari
<http://edukasi.kompas.com/read/2013/05/24/18285883>

PERATURAN PEMERINTAH DAN UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran , Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 butir 5 pengertian Jenjang Pendidikan adalah suatu tahap dari pendidikan berkelanjutan yang ditempatkan berdasarkan perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 10 dijelaskan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan

UUD 1945 Pasal 31, ayat 3 tentang usaha pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 15 tentang Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tentang penyerahan sejumlah wewenang yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan bidang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang bertujuan memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, transparan dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

DASAR HUKUM

Dasar-dasar hukum SKB 5 (lima) Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Guru dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;